



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN MELALUI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT DI DESA SAMBIREJO TIMUR

Nurainun, Stevan Oktureja Pasaribu, Dahlianatalia Lumban Gaol, Julia Ivanna

PPKn, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Abstrak

Jaminan kesehatan merupakan salah satu hak yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka pemerintah memiliki peran untuk memenuhi hak tersebut. Di Indonesia untuk memberikan jaminan kesehatan terutama pada masyarakat yang kurang mampu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki berbagai program, salah satunya yaitu program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Desa Sambirejo Timur dalam memberikan jaminan kesehatan melalui KIS. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dihasilkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian pemerintah Desa Sambirejo Timur dalam mengimplementasikan kebijakan program KIS sudah sangat baik, terlihat dalam strategi memberikan informasi secara transparansi dan akurat kemudian memastikan program KIS tepat sasaran bahkan bersedia mengantarkan masyarakat ke rumah sakit menggunakan ambulans desa secara gratis.

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat, Peran Pemerintah Desa.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat banyak serta beragam suku bangsa dan kebudayaan. Setiap negara tentu memiliki beberapa masalah, termasuk faktor-faktor tertentu yang menghambat kemajuan negara tersebut, seperti kesenjangan ekonomi dan

kesehatan. Mengenai masalah kesehatan, pada tahun 2015 program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan selama hampir dua tahun. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertindak sebagai pelaksana JKN dan bekerja sama dengan layanan kesehatan baik primer, sekunder, dan tersier, baik negeri maupun swasta. Dasar hukum pelaksanaan BPJS tercantum dalam

*Correspondence Address : nurainun040113@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i6.2024. 2277-2282

© 2024UM-Tapsel Press

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), khususnya Pasal 1 dan Pasal 52, serta beberapa peraturan lainnya (Br Simbolon et al. 2020).

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga merupakan hak setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan adalah aset utama untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan investasi dalam sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Di negara berkembang seperti Indonesia, peran pemerintah sangat diperlukan melalui layanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Dalam konteks hak asasi, kesehatan adalah hak setiap individu yang wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh negara (Ardinata, 2020).

Kesehatan adalah modal utama untuk pertumbuhan dan kehidupan bangsa, serta memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Tingkat kesehatan juga sangat penting untuk pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia yang merupakan dasar dari pembangunan nasional, yang pada dasarnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang baik, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (warga negara), negara wajib memenuhi hak atas pelayanan kesehatan (Basuki 2020).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengatakan bahwa bidang kesehatan merupakan urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Negara Indonesia dalam memberikan Jaminan Kesehatan

memiliki strategi salah satunya adalah Pada tanggal 3 November 2014, Presiden Joko Widodo meluncurkan program kesehatan baru bernama Kartu Indonesia Sehat (KIS). KIS adalah kartu yang berfungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat menerima pelayanan kesehatan secara gratis. Kartu ini dapat digunakan di berbagai fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. KIS merupakan perluasan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang seharusnya menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam BPJS Kesehatan, tetapi belum terjangkau. Selain itu, KIS menawarkan manfaat tambahan dalam pelayanan kesehatan, termasuk layanan preventif, promotif, dan deteksi dini yang dilakukan secara lebih intensif dan terintegrasi (Deysi Liem Fat Salim, Nontje Rimbing, 2020).

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program ini berfungsi sebagai Kartu Jaminan Kesehatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat kedua. KIS tidak hanya digunakan untuk pengobatan, melainkan juga untuk proses lainnya yang terkait dengan kesehatan. Program ini berada di bawah pengawasan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS, tujuan dari KIS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu aspek terpenting dalam pembangunan manusia, dengan fokus pada pembangunan kesehatan.

Kesehatan adalah investasi bagi negara, karena hanya orang yang sehat secara fisik dan mental saja yang dapat melakukan pembangunan di masa depan. Untuk mewujudkan tujuan negara, diperlukan sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, dan berkualitas. Dalam kenyataannya, ada

banyak tantangan yang menghalangi upaya untuk meningkatkan akses penduduk miskin pada pelayanan kesehatan. Tidak diragukan lagi, lokasi fasilitas kesehatan bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan kesenjangan pelayanan kesehatan. Faktor lain termasuk kemampuan finansial, ketersediaan peralatan kesehatan, kecukupan tenaga medis dan paramedis, informasi tentang kondisi kesehatan, dan jaringan bisnis dalam industri kesehatan. Namun, salah satu faktor yang memengaruhi yang kesenjangan sosial dan kesenjangan kesehatan (Moniung, Singkoh, and Liando 2017).

Desa Sambirejo Timur sebagai salah satu Instansi Pemerintahan yang berhubungan dekat dengan masyarakat, di Desa Sambirejo Timur keberadaan bantuan kesehatan berupa program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum begitu dapat dipahami oleh masyarakat. Maka melihat pentingnya jaminan kesehatan yang harus didapatkan warga negara terutama warga negara yang tidak mampu, maka penelitian ini ingin mengetahui implementasi kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Sambirejo Timur dalam menjamin kesehatan masyarakatnya serta apa dampak yang dirasakan baik dari pemerintah ataupun masyarakat dengan adanya program ini.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Soegianto, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Maka dari segi

besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data (Hafsiah Yakin, 2023). Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah masyarakat dan pemerintah desa. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah memiliki peran dalam mengatur kehidupan bersama serta mengelola urusan pelayanan publik. Memberikan pelayanan yang unggul adalah tanggung jawab utama yang diemban oleh pemerintah dan menjadi indikator kinerja pemerintah. Negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negara guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyedia layanan publik adalah kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara terkait peningkatan kualitas pelayanan publik (Nasution et al., 2022). Pemerintah memiliki peran yang sangat besar untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak masyarakat dan melaksanakannya menurut undang-undang. Setiap pemerintahan harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena pemerintah menjalankan manajemen pemerintahan, maka pengelolaannya harus direncanakan, dilaksanakan,

diawasi, dipertanggungjawabkan, dan dievaluasi, yang dikenal sebagai penataan desa (Rudy, 2022).

Peran Pemerintah Desa Sambirejo Timur dalam membantu kebijakan pemerintah terkait KIS, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat siap mengupayakan mendampingi dan mengantarkan warganya kerumah sakit karena pemerintah Desa Sambirejo Timur sangat menyadari bahwa kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama. Kesehatan adalah modal utama untuk pertumbuhan dan kehidupan bangsa, serta memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Tingkat kesehatan juga sangat penting untuk pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia yang merupakan dasar dari pembangunan nasional, yang pada dasarnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang baik, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (warga negara), negara wajib memenuhi hak atas pelayanan kesehatan (Basuki 2020).

Pemerintah Desa Sambirejo Timur memfasilitasi masyarakat untuk mendaftarkan masyarakat untuk memperoleh program Jaminan Kesehatan KIS. Adapun kebijakan yang dilakukan agar masyarakat mengetahui informasi terkait KIS, kepala desa menghimbau kepada kepala dusun agar menyampaikan kepada seluruh warga bahwasanya pemerintah membuka peluang untuk pengusulan KIS, Di Desa Sambirejo Timur biasanya melakukan perwiritan akbar untuk para ibu-ibu di Desa Sambirejo Timur dan biasanya itu dijadikan momentum untuk pemerintah desa melakukan sosialisasi terkait pendaftaran KIS bagi masyarakat. Dalam menyampaikan pendaftaran KIS kepala dusun menyampaikan kepada

masyarakat bahwa sifatnya pengusulan ke dinas sosial, kemudian juga menjelaskan kepada masyarakat untuk membawa berkas ke kantor desa. Dalam penyampian informasi terkait KIS pemerintah desa menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka seperti menjelaskan bahwa syaratnya salah satunya yang menerima bantuan ini harus masyarakat yang tidak mampu harus mengurus surat keterangan tidak mampu dari kantor desa. Pemerintah desa juga memastikan bahwa Program KIS tepat sasaran dan harus didapatkan oleh keluarga yang kurang mampu.

Di Desa Sambirejo Timur masyarakat yang sudah menerima dan memiliki KIS berjumlah sekitar 200 keluarga, untuk masyarakat lainnya memiliki program jaminan kesehatan lainnya, baik itu yang ditanggung iuranya secara mandiri atau ditanggung oleh perusahaan tempat masyarakat tersebut bekerja. Dalam mengimplementasikan program kesehatan KIS dan menjamin Kesehatan masyarakat Pemerintah desa siap mengantarkan masyarakat yang sakit menggunakan ambulans yang disediakan oleh perangkat pemerintah desa. Desa Sambirejo Timur terdapat dua ambulans, satu ambulans milik pemerintah desa dan satu lagi berasal dari salah satu masyarakat yang menghibahkan hartanya untuk membeli ambulans, sehingga kedua ambulans tersebut difungsikan untuk menjadi transportasi secara gratis untuk akomodasi seperti bahan bakar minyak pemerintah desa menggunakan metode sedekah gaji tiap bulan yang dikutip dari pemerintah desa, hal ini dilakukan agar pemerintah desa dapat memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat yang memerlukan bantuan.

Pemerintah dan masyarakat Desa Sambirejo Timur menjelaskan bahwa dengan adanya program KIS sangat membantu masyarakat karena Ketika masyarakat ketika tiba-tiba sakit terutama masyarakat yang kurang

mampu yang memang sangat perlu untuk diajukan ke rumah sakit dan bisa meringankan biayanya. Terdapat tantangan yang dirasakan pemerintah desa sambirejo timur dalam melaksanakan kebijakan KIS. Program KIS merupakan program yang bersifat pengusulan dan masyarakat yang bisa menerimanya harus benar-benar memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan oleh dinas sosial. Pemerintahan desa menginformasikan berkas bisa masuk melalui pemerintahan desa dan kemudian akan diseleksi kembali oleh dinas sosial, tetapi terkadang misal pendaftar dari Desa Sambirejo Timur sebanyak 500 kartu keluarga tetapi yang menerima bantuan hanya 400 kartu keluarga, sehingga masyarakat merasa kecewa pada pemerintah desa, karena masyarakat tidak mengetahui bahwa yang memutuskan adalah dinas sosial, pemerintah desa hanya memfasilitasi dan membantu pelaksanaan program KIS. Kemudian terdapat masyarakat yang telah menerima KIS tetapi kartunya tidak pernah dipergunakan untuk berobat di puskesmas ataupun di rumah sakit maka kartu tersebut akan dinonaktifkan karena KIS jika tidak dipergunakan maksimal 1 tahun akan dinonaktifkan kemudian akan dialihkan ke yang lain, kemudian pemerintah Desa Sambirejo Timur berharap bahwa pemerintah memiliki jalur khusus bagi masyarakat yang kurang mampu dalam keadaan sakit yang harus dibawa ke rumah sakit langsung bisa dialihkan ke rumah sakit dan pemerintah membuka kouta terbatas untuk penerimaan KIS.

SIMPULAN

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) telah berhasil menjadi salah satu instrumen efektif dalam meningkatkan akses layanan kesehatan di Desa Sambirejo Timur. Partisipasi aktif masyarakat dan strategi pemerintah

Desa Sambirejo Timur dalam dalam mengimplementasikan program ini menjadi salah satu kunci keberhasilannya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya merata tentang manfaat program ini. Meskipun tantangan implementasinya masih ada, program ini mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Melalui evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, pemerintah dapat memastikan bahwa program tersebut dapat terus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan YME karena rahmatnya, sehingga jurnal ini dengan Judul "Implementasi Kebijakan Kesehatan Melalui Program Kartu Indonesia Sehat Di Desa Sambirejo Timur" dapat terbit dan terselesaikan dengan baik. Sehubungan dengan terselesaikannya jurnal ini, maka izinkan kami dengan penuh kerendahan hati menyampikan rasa terimakasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat rekan-rekan tim penulis yang ikut serta dalam pembuatan jurnal ini. Serta ucapan terimakasih kepada pemerintah dan masyarakat Desa Sambirejo Timur telah bersedia menjadi tempat peneliti untuk melakukan riset dan sudah meluangkan waktu sehingga peneliti bisa menyelesaikan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hariyanto, M, (2012). Ilmu Sosial dan Hegemoni Barat: Tantangan Bagi Ilmuan Sosial Muslim. Diunduh di

<http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/ilmu-sosial-dan-hegemoni-barat-tantangan-bagi-ilmuan-sosial-muslim/> tanggal 09 Juli 2017

Levy, M. (2000). Environmental scarcity and violent conflict: a debate. Diunduh di <http://wwics.si.edu/organiza/afil/WWICS/PROGRAMS/DIS/ECS/report2/debate.htm> tanggal 4 Juli.

Ardinata, Mikho. 2020. "State Responsibility for Health Insurance in the Perspective of Human Rights." *Jurnal HAM* 11(2): 319.

Basuki, Udiyo. 2020. "Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1(1): 21-41. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/699>.

Br Simbolon, Naomi Rahmawati, Marlon Sihombing, Heri Kusmanto, and Isnaini Isnaini. 2020. "Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 1(2): 147-55.

Deysi Liem Fat Salim, Nontje Rimbing, Theodorus H.W. Lumunon. 2020. "Aksesibilitas Pembiayaan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional." *Lex Et Societatis* VIII(4): 104-14.

Hafsiah Yakin, Ipa. 2023. "Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif." *Jurnal EQUILIBRIUM* 5(January): 1-7.

Moniung, Rikal Eben, Frans Singkoh, and Daud Markus Liando. 2017. "Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan Kabupaten Minahasa." *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Nasution, Irza Fari Syahdilla, Dadan Kurniansyah, and Evi Priyanti. 2022. "Analisis Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)." *Kinerja* 18(4): 527-32.

Rudy. 2022. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Aura.